

## Menakar Mutu dan Kesenjangan dalam Urgensi Standarisasi Penilaian Hasil Belajar

M. Imam Khaudli<sup>1</sup>, Ahmad Dzofron Abiyyu Tsaqib Muhes<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas KH. Mukhtar Syafaat Banyuwangi, Indonesia

Corresponding author: M. Imam Khaudli, Email: [anakembakhkhor@gmail.com](mailto:anakembakhkhor@gmail.com)

Published: June, 2025

---

### ABSTRACT

Dalam konteks upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, penilaian hasil belajar yang terstandar menjadi komponen krusial yang perlu mendapat perhatian khusus. Ketidakterpaduan sistem penilaian antar sekolah sering kali menjadi sumber ketimpangan dalam pengukuran capaian belajar siswa. Hal ini tidak hanya berdampak pada mutu pendidikan, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan akses terhadap standar evaluasi yang adil dan objektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi dan peran standarisasi penilaian hasil belajar dalam memastikan keadilan dan kualitas pendidikan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Sekolah Menengah Terpadu Darussalam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan guru dan kepala sekolah, observasi proses penilaian, serta analisis dokumen kebijakan dan hasil penilaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakterpaduan sistem penilaian antarsekolah menyebabkan perbedaan signifikan dalam pengukuran capaian belajar siswa yang berimplikasi pada ketimpangan mutu pendidikan. Standarisasi penilaian diidentifikasi sebagai solusi strategis yang dapat menyelaraskan kriteria evaluasi, meningkatkan akuntabilitas, dan mendukung kebijakan pendidikan yang berkeadilan. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan rekomendasi berbasis data untuk pengembangan kebijakan penilaian nasional yang lebih terintegrasi dan efektif. Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam meningkatkan sistem evaluasi pembelajaran sehingga tercipta standar penilaian yang adil, valid, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Penjaminan mutu, Kesenjangan penilaian, Standarisasi penilaian

---

### ABSTRACT

*In the context of efforts to improve the quality and equity of education, standardized assessment of learning outcomes is a crucial component that needs special attention. The inconsistency of the assessment system between schools is often a source of inequality in measuring student learning achievements. This not only affects the quality of education, but also reflects inequality in access to fair and objective evaluation standards. This study aims to examine the urgency and role of standardizing learning outcomes assessment in ensuring equity and quality of education. The method used is a qualitative approach with a case study at Darussalam Integrated Secondary School. Data were collected through in-depth interviews with teachers and principals, observation of the assessment process, and document analysis of policies and assessment results. The results showed that the inconsistency of the assessment system between schools caused significant differences in the measurement of student learning achievements, which had implications for the inequality of education quality. Assessment standardization is identified as a strategic solution that can align evaluation criteria, improve accountability and support equitable education policies. The contribution of this research is to provide data-based recommendations for the development of a more integrated and effective national assessment policy. The findings are expected to serve as a foundation in improving the learning evaluation system so as to create fair, valid, and sustainable assessment standards in Indonesia.*

*Keywords: Quality assurance, Assessment equity, Assessment standardization*

---

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

---

### PENDAHULUAN

Penilaian hasil belajar di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia masih menunjukkan ketidakkonsistenan antar sekolah. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar nasional yang tegas dan seragam dalam penerapan sistem penilaian. Akibatnya, sekolah memiliki kebebasan dalam

merumuskan indikator dan tolok ukur penilaian berdasarkan kebijakan internal atau persepsi individu guru. Hasil penelitian Kemendikbudristek tahun 2022 menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam rata-rata nilai rapor antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan untuk mata pelajaran yang sama. (Isnani & Hadiansyah, 2025; Arifin & Hanif, 2024; Wang et al., 2023). Ketidakseimbangan ini menjadi hambatan saat siswa mengikuti seleksi masuk SMA favorit atau mendaftar beasiswa, karena nilai akademik tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan sesungguhnya. Fenomena ini menunjukkan pentingnya diterapkan sistem penilaian yang terstandar agar semua siswa dinilai berdasarkan ukuran yang setara dan objektif.

Selain perbedaan antar sekolah, standarisasi penilaian juga masih sering dipengaruhi oleh subjektivitas guru. Banyak pendidik masih mengandalkan pendekatan konvensional yang belum berbasis instrumen penilaian yang terstruktur dan adil. Hal ini umumnya terjadi karena minimnya pelatihan profesional mengenai asesmen yang sah dan autentik. Hasil survei PGRI pada 2021 menyatakan bahwa banyak Sebagian guru belum pernah mengikuti pelatihan khusus mengenai teknik penilaian berbasis kompetensi (Nissa, 2023; Taridala & Anwar, 2023; Mulyasa, 2021). Akibatnya, penilaian sering dipengaruhi oleh faktor non-pedagogis seperti perilaku, keaktifan di kelas, atau bahkan kedekatan guru dengan siswa. Situasi ini menyebabkan nilai siswa tidak selalu merepresentasikan capaian akademik yang sebenarnya, melainkan lebih mencerminkan persepsi pribadi guru. Jika penilaian tetap berlangsung dengan cara seperti ini, maka prinsip keadilan dalam pendidikan sulit untuk diwujudkan secara menyeluruh.

Permasalahan lain yang turut memperparah kualitas penilaian adalah ketimpangan akses terhadap sumber daya asesmen yang layak, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Sekolah-sekolah di daerah tersebut menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan fasilitas, minimnya teknologi, hingga kurangnya pelatihan bagi guru. Menurut data BPS tahun 2023, masih sangat sedikit sekolah di wilayah 3T yang memiliki perangkat digital yang memadai untuk mendukung pelaksanaan asesmen berbasis teknologi (Susanto & Hermina, 2024; Aini, 2020; Prastyaningrum et al., 2023). Selain itu, pelatihan penilaian pun belum menjangkau seluruh guru secara merata. Akibatnya, pendekatan asesmen yang diterapkan cenderung terbatas, seperti penggunaan soal pilihan ganda yang tidak mencerminkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ketimpangan ini semakin memperkuat urgensi untuk menerapkan sistem penilaian yang terstandar secara nasional dan inklusif, agar semua siswa memiliki kesempatan yang adil dalam menunjukkan kemampuan mereka, terlepas dari kondisi geografis atau fasilitas yang dimiliki sekolah.

Studi terbaru menunjukkan bahwa standarisasi penilaian hasil belajar sangat penting untuk menciptakan keadilan dan konsistensi dalam pendidikan. Kusumawati. (2022) menyatakan bahwa perbedaan cara penilaian antar sekolah menyebabkan ketidakseimbangan dalam menilai kemampuan siswa, sehingga dibutuhkan standar nasional yang jelas mengenai indikator dan metode penilaian. Namun,

penerapan standar tersebut tidak akan efektif tanpa peningkatan kompetensi guru. Fernanda et al. (2025) menemukan bahwa banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan memadai tentang penilaian autentik, sehingga masih kerap menggunakan cara penilaian yang subjektif dan kurang valid. Oleh sebab itu, mereka menyarankan agar ada pelatihan berkelanjutan serta panduan rubrik penilaian yang standar untuk meningkatkan kejelasan dan ketepatan dalam evaluasi. Azzahra & Rahmadhani. (2025) menekankan pentingnya memperhatikan pemerataan akses terhadap teknologi dan sumber daya penilaian, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih mengalami keterbatasan. Dengan demikian, standarisasi penilaian juga harus inklusif agar tidak semakin memperlebar kesenjangan antara sekolah di perkotaan dan daerah terpencil, sehingga semua siswa mendapat kesempatan yang adil dalam penilaian.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pentingnya standarisasi penilaian hasil belajar untuk menciptakan keadilan dan konsistensi dalam pendidikan, sekaligus mengungkap masalah seperti perbedaan cara penilaian antar sekolah, minimnya pelatihan bagi guru, serta keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil. Namun, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menggabungkan upaya standarisasi indikator dan metode penilaian dengan peningkatan kompetensi guru dan pemerataan fasilitas penilaian secara bersamaan. Artinya, penelitian ini tidak hanya menekankan pentingnya adanya standar nasional, tetapi juga menyoroti perlunya pelatihan berkelanjutan bagi guru dan kebijakan yang inklusif, terutama bagi sekolah di wilayah dengan tantangan geografis. Pendekatan menyeluruh ini diharapkan dapat menjawab berbagai hambatan sekaligus, sehingga penerapan standar penilaian tidak hanya seragam, tetapi juga efektif dan adil bagi semua siswa.

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena masih banyak ketidakadilan dan perbedaan dalam penilaian hasil belajar yang mana menjadi masalah utama di dunia pendidikan. Berbagai studi sebelumnya mengungkapkan adanya perbedaan cara penilaian antar sekolah, kurangnya pelatihan yang cukup bagi guru, dan keterbatasan akses teknologi terutama di daerah terpencil. Penelitian ini hadir dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, tidak hanya fokus pada standarisasi indikator dan metode penilaian secara nasional, tetapi juga pada peningkatan kemampuan guru melalui pelatihan rutin serta pemerataan fasilitas penilaian di seluruh wilayah. Dengan cara ini, diharapkan berbagai hambatan, baik geografis maupun sosial, bisa diatasi sehingga penilaian menjadi lebih adil dan merata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih efektif, inklusif, dan berkeadilan untuk sistem penilaian di seluruh Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji urgensi dan peran standarisasi penilaian hasil belajar dalam memastikan keadilan dan kualitas pendidikan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Terpadu Darussalam, sebuah sekolah menengah pertama swasta yang berada di wilayah semi-perkotaan. Sekolah ini memiliki karakteristik siswa

dan guru yang cukup beragam, baik dari latar belakang sosial ekonomi maupun pengalaman pendidikan. Objek penelitian ini dipilih karena mencerminkan kondisi nyata di mana proses penilaian hasil belajar masih sangat bergantung pada kebijakan internal sekolah dan inisiatif guru, tanpa adanya panduan standar nasional yang tegas. Selain itu, sekolah ini juga menghadapi kendala dalam pemerataan pelatihan penilaian serta keterbatasan fasilitas teknologi yang mendukung asesmen berbasis digital. Kondisi-kondisi tersebut menjadikan sekolah ini sebagai lokasi yang tepat untuk mengkaji lebih dalam pentingnya standarisasi penilaian. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai tantangan di lapangan dan bagaimana kebijakan penilaian yang adil dan merata bisa diterapkan secara efektif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang bertujuan untuk menggali secara mendalam urgensi standarisasi penilaian hasil belajar di jenjang Sekolah Menengah Pertama, dengan fokus pada SMP Terpadu Darussalam. Metode ini dipilih karena dapat menangkap secara langsung pengalaman, pandangan, dan kebiasaan para guru serta pihak sekolah dalam melakukan proses penilaian terhadap siswa. Melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, penelitian ini mencoba memahami bagaimana praktik penilaian dilakukan, seberapa jauh guru memahami konsep penilaian yang adil dan objektif, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menerapkannya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata di lapangan sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan penilaian yang lebih terarah. Dengan begitu, sistem evaluasi pembelajaran dapat lebih seragam, transparan, dan menjamin keadilan bagi seluruh siswa, tanpa terkecuali.

Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang memiliki peran penting dalam proses penilaian hasil belajar. Guru mata pelajaran IPA dipilih karena mereka langsung bertanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan penilaian di bidang sains, sehingga dapat memberikan gambaran tentang praktik dan tantangan yang mereka hadapi. Guru bahasa Indonesia juga menjadi informan kunci karena peran bahasa sangat penting dalam komunikasi dan evaluasi pembelajaran. Kepala bidang kurikulum turut dilibatkan untuk memberikan pandangan tentang kebijakan dan pengawasan penerapan standar penilaian di sekolah. Selain itu, Guru bimbingan dan konseling (BK) menjadi sumber informasi untuk memahami aspek psikologis dan sosial yang memengaruhi proses penilaian dan kebutuhan siswa. Tak kalah penting, orang tua siswa juga diwawancarai untuk mengetahui harapan dan pandangan mereka terhadap sistem penilaian di sekolah. Dengan berbagai informan ini, diharapkan data yang terkumpul dapat memberikan gambaran lengkap dan seimbang terkait urgensi standarisasi penilaian hasil belajar.

**Tabel 1. Informan Penelitian**

| No | Jabatan        | Kode Informan | Keterangan                                                                                                                    | Jumlah |
|----|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Guru Mapel IPA | BIO           | menyusun indikator pencapaian kompetensi, membuat instrumen evaluasi seperti tes tertulis, praktikum, serta penilaian proyek. | 1      |

| No    | Jabatan               | Kode Informan | Keterangan                                                                                                                                                         | Jumlah |
|-------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2     | Guru B. Indonesia     | BID           | menyusun berbagai instrumen asesmen untuk mengukur kemampuan siswa dalam membaca, menulis, menyimak, dan berbicara secara efektif                                  | 1      |
| 3     | Kepala bid. Kurikulum | KBK           | bertanggung jawab mengelola dan mengawasi pelaksanaan kurikulum di sekolah agar sesuai dengan standar nasional pendidikan.                                         | 1      |
| 4     | Guru BK               | BK            | berperan membantu mengidentifikasi faktor-faktor non-akademik yang memengaruhi prestasi siswa, seperti motivasi belajar, masalah pribadi, atau kendala psikologis. | 2      |
| 5     | Orang tua siswa       | OTS           | memberikan dukungan moral dan motivasi agar siswa dapat belajar dengan baik dan disiplin.                                                                          | 7      |
| Total |                       |               |                                                                                                                                                                    | 12     |

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara agar informasi yang diperoleh bisa lengkap dan mendalam mengenai urgensi standarisasi penilaian hasil belajar. Pertama, dilakukan wawancara mendalam dengan guru, kepala sekolah, dan staf terkait untuk memahami pengalaman mereka, kendala yang dihadapi, serta pandangan mereka tentang pelaksanaan penilaian di sekolah. Kedua, observasi langsung di kelas dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana proses penilaian berlangsung, mulai dari pemberian nilai hingga pemakaian instrumen penilaian yang ada. Ketiga, dilakukan studi dokumentasi dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen penilaian seperti rubrik, nilai rapor, dan pedoman penilaian yang digunakan oleh sekolah. Gabungan ketiga metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang kondisi penilaian saat ini serta membantu mengidentifikasi kebutuhan akan standarisasi penilaian yang lebih efektif, adil, dan transparan.

Analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman yang meliputi tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Pada tahap reduksi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi disaring dan diringkas agar hanya informasi penting terkait urgensi standarisasi penilaian hasil belajar yang menjadi fokus. Selanjutnya, data yang sudah disederhanakan disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik supaya memudahkan pemahaman pola dan keterkaitan antar aspek. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan, di mana peneliti menginterpretasikan pola-pola yang muncul dan memastikan validitas data melalui teknik triangulasi. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang terstruktur dan mendalam, sehingga dapat memberikan gambaran jelas mengenai kebutuhan serta tantangan dalam menerapkan standar penilaian yang adil dan konsisten di Sekolah Menengah Pertama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Variasi Penilaian Antar Sekolah

Perbedaan yang mencolok dalam praktik penilaian antar sekolah, yang mana mengakibatkan ketimpangan sosial dalam sistem evaluasi pendidikan di Indonesia. Sekolah-sekolah di perkotaan atau yang memiliki akreditasi baik umumnya menerapkan penilaian yang lebih terstruktur dan objektif.

Sebaliknya, sekolah-sekolah di daerah terpencil dengan keterbatasan sumber daya lebih sering menggunakan penilaian yang bersifat subjektif, bergantung pada kebijakan internal dan persepsi guru. Akibatnya, nilai yang diperoleh siswa tidak selalu mencerminkan kemampuan mereka secara utuh, melainkan dipengaruhi oleh kondisi dan kebijakan sekolah masing-masing. Perbedaan ini menimbulkan kesenjangan yang merugikan siswa dari sekolah dengan fasilitas terbatas, meskipun mereka memiliki kemampuan yang setara. Temuan ini menekankan pentingnya upaya standarisasi sistem penilaian agar setiap siswa, di manapun mereka belajar, mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan yang setara untuk menunjukkan potensi akademiknya (Rafiq, 2025; Rahmi & Zeky, 2024; Kurniawan et al., 2022). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama guru mapel Bahasa Indonesia SMP Terpadu Darussalam bapak M. Khabiburrahman, S.Pd. ia mengutarakan,

*“Tidak semua siswa mampu mengikuti standar nasional secara penuh, sehingga soal dan kriteria penilaian sering disesuaikan dengan kondisi nyata siswa dan keterbatasan sarana di sekolah. Di sisi lain, guru dari sekolah berakreditasi tinggi menyampaikan bahwa mereka menggunakan rubrik penilaian yang sudah terstandar dan rutin mengikuti pelatihan, sehingga penilaian yang diberikan cenderung lebih konsisten dan terukur. dari ini lah kita dapat mengetahui bahwa ada perbedaan nyata dalam hal penilaian yang mana semua itu tergantung kondisi masing masing lingkungan sekolah.” (BID)*

Hal ini juga disampaikan Kepala Bidang Kurikulum Sekolah Menengah Terpadu Darussalam Bapak Ujang Warju S.Pd, M.Pd, ia menyatakan,

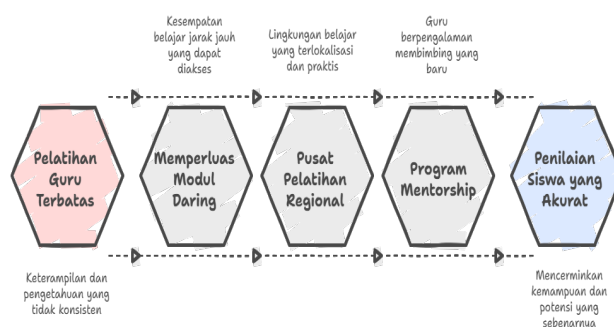
*“ Penilaian di sekolah kami selalu mengacu pada standar nasional, namun tetap mempertimbangkan kemampuan siswa. Kami berusaha menyesuaikan soal agar tidak memberatkan siswa yang kesulitan, terutama dalam situasi pembelajaran daring. Namun, kami juga rutin mengikuti pelatihan untuk menjaga kualitas penilaian agar tetap objektif dan adil.” (KBK)*

Penelitian ini mengungkapkan adanya ketimpangan dalam cara penilaian pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan ketersediaan sumber daya di sekolah. Berdasarkan teori stratifikasi sosial dalam dunia pendidikan, perbedaan fasilitas dan akses antara sekolah di kota besar dan daerah terpencil menyebabkan kualitas penilaian menjadi tidak merata, yang pada akhirnya berdampak pada keadilan dalam pendidikan (Kusuma et al., 2024; Ningrum, 2022; Agustin & Hariyani, 2023). Penilaian yang bersifat subjektif dan kurang terstandar di sekolah dengan sumber daya terbatas membuat nilai siswa tidak selalu mencerminkan kemampuan sebenarnya, sehingga kesempatan belajar dan pengakuan akademik menjadi tidak seimbang. Sebaliknya, sekolah yang memiliki akreditasi baik dan menggunakan rubrik penilaian standar mampu memberikan evaluasi yang lebih objektif dan konsisten. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya standarisasi dalam sistem penilaian untuk mengurangi kesenjangan sosial, serta memastikan bahwa setiap siswa mendapat perlakuan yang adil. Dengan begitu, lingkungan belajar dapat menjadi lebih inklusif dan mendukung pengembangan potensi setiap siswa tanpa adanya diskriminasi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian di sekolah-sekolah Indonesia masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar, terutama dipengaruhi oleh perbedaan sosial dan ketersediaan sumber daya. Sekolah di kota dengan fasilitas yang lebih lengkap cenderung menerapkan penilaian yang lebih terorganisir dan objektif, sementara sekolah di daerah terpencil sering menggunakan penilaian yang lebih subjektif dan kurang terstandar (Mawlana, 2023; Octavia, 2023; Farhas, 2021). Kondisi ini membuat nilai siswa tidak selalu mencerminkan kemampuan sebenarnya, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam pendidikan. Oleh sebab itu, standarisasi penilaian sangat diperlukan agar semua siswa, di mana pun mereka belajar, mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama untuk berkembang.

### Kurangnya Pelatihan Guru dalam Penilaian

Kurangnya pelatihan bagi guru dalam hal penilaian masih menjadi salah satu hambatan besar dalam upaya memperbaiki kualitas evaluasi pendidikan di Indonesia. Banyak guru, terutama yang mengajar di daerah terpencil, masih sulit mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai cara dan standar penilaian yang tepat. Menurut data Kementerian Pendidikan, hampir 40% guru di wilayah pelosok belum mengikuti pelatihan penilaian secara formal dalam lima tahun terakhir (Ristanti, 2023; Aulia, 2022; Duryat, 2022). Hal ini menyebabkan kualitas penilaian yang mereka berikan seringkali tidak konsisten dan kurang sesuai dengan standar nasional, sehingga nilai yang diperoleh siswa tidak selalu mencerminkan kemampuan sebenarnya. Selain itu, tingginya beban kerja guru dan minimnya dukungan dari sekolah juga memperburuk situasi ini. Oleh sebab itu, penting untuk memperbanyak pelatihan dan pendampingan agar penilaian dapat dilakukan secara objektif, adil, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Untuk lebih mudahnya dapat dilihat dalam diagram di bawah ini.



Gambar 1. diagram alur proses peningkatan kualitas penilaian siswa

Diagram di atas menggambarkan alur solusi dari permasalahan pelatihan guru yang terbatas menuju penilaian siswa yang lebih akurat. Pembacaan dimulai dari kondisi awal yaitu keterbatasan pelatihan guru yang menyebabkan kurangnya keterampilan dan pengetahuan penilaian yang konsisten. Untuk mengatasinya, dapat dilakukan dengan memperluas modul daring sebagai solusi pembelajaran jarak jauh,

menyediakan pusat pelatihan regional untuk pendekatan praktik yang lebih dekat dan aplikatif, serta mengadakan program mentorship, di mana guru berpengalaman mendampingi guru baru. Ketiga intervensi tersebut diharapkan berkontribusi terhadap tercapainya penilaian siswa yang akurat, yang mencerminkan kemampuan dan potensi siswa secara nyata.

Berkaitan dengan minimnya pelatihan penilaian bagi guru, temuan ini diperkuat melalui hasil wawancara dengan Bapak Amirul Mukhlisin, S.Pd., seorang guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Ia mengutarakan,

*“ Selama lebih dari tiga tahun mengabdikan di lembaga ini, saya belum pernah mendapat pelatihan khusus tentang penilaian. Kami hanya mengandalkan pengalaman dan diskusi sesama guru. Padahal, seringkali kami bingung menyusun soal dan rubrik yang sesuai standar. Dari hal inilah yang membuat para pengajar seperti kami kebingungan dalam menerapkan penilaian yang objektif dan sesuai dengan kaidah evaluasi pendidikan” (BIO)*

Pembahasan ini menyoroti bahwa kurangnya pelatihan penilaian bagi guru, terutama di daerah terpencil, menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan kualitas pendidikan (Hasanah, 2025; Mulyanti, 2025; Wijayati et al., 2025). Dari aspek sosial, banyak guru harus mengandalkan pengalaman sendiri dan diskusi informal karena mereka tidak mendapatkan pelatihan formal yang berkelanjutan. Hal ini juga terlihat dari kondisi di lapangan, di mana banyak guru mengalami kesulitan dalam menyusun soal dan rubrik penilaian yang sesuai dengan standar, terutama karena belum pernah mendapatkan pelatihan yang memadai di bidang tersebut. Ketidakpastian ini berpotensi membuat penilaian menjadi kurang objektif dan tidak mampu menggambarkan kemampuan siswa secara menyeluruh. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jurang antara kebijakan standar nasional dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu berupaya memberikan pelatihan yang merata dan terencana, sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjamin evaluasi yang adil, profesional, dan akurat di seluruh Indonesia.

Kesimpulannya, ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh minimnya pelatihan penilaian bagi guru, terutama yang berada di daerah terpencil. Banyak guru masih bergantung pada pengalaman pribadi dan diskusi informal karena akses ke pelatihan formal yang berkelanjutan sangat terbatas. Hal ini membuat guru kesulitan dalam merancang soal dan rubrik penilaian yang sesuai standar, sehingga ada risiko penilaian yang kurang objektif dan tidak mencerminkan kemampuan siswa secara menyeluruh (Abdullah et al., 2025; Busnawir et al., 2025; Wijayati, 2025). Kondisi ini mencerminkan adanya jarak yang cukup jauh antara kebijakan standar nasional dengan realita di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan pelatihan penilaian tersedia secara merata dan terencana untuk semua guru, terutama di daerah terpencil. Dengan langkah ini, kualitas penilaian dapat meningkat, tercipta keadilan dan profesionalisme, serta mendukung pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

**Kesenjangan Hasil Belajar Perkotaan dan Pedesaan**

Standarisasi Penilaian Hasil Belajar siswa antara di daerah kota dan desa terjadi perbedaan yang cukup. Siswa yang tinggal di kota cenderung memiliki akses yang lebih mudah terhadap fasilitas pendidikan, teknologi, dan berbagai sumber belajar yang mendukung proses pembelajaran. Sementara itu, siswa di wilayah pedesaan sering kali menghadapi tantangan seperti minimnya sarana dan prasarana, kurangnya guru yang berkompeten, serta keterbatasan dalam mengikuti pelatihan pendidikan. Akibatnya, prestasi akademik siswa di pedesaan cenderung tertinggal dibandingkan dengan siswa di kota. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga serta dukungan dari lingkungan sekitar juga turut memengaruhi kualitas hasil belajar mereka. Temuan ini menekankan pentingnya perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait untuk mengurangi kesenjangan ini, melalui pemerataan kualitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, dan penyediaan fasilitas belajar yang memadai di seluruh wilayah, tanpa terkecuali (Mutaqin et al., 2025; Setiasih et al., 2024; Ayu et al., 2024).

**Tabel 2. kesenjangan hasil belajar**

| No | Indikator                   | Perkotaan      | Pedesaan                |
|----|-----------------------------|----------------|-------------------------|
| 1  | Rata-rata nilai ujian akhir | 82,5           | 68,3                    |
| 2  | Jumlah guru bersertifikasi  | 85%            | 47%                     |
| 3  | Akses internet              | 100% terhubung | 40% terhubung           |
| 4  | Rasio siswa dengan guru     | 25:1           | 40:1                    |
| 5  | Pelatihan guru per tahun    | 3 kali         | 1 kali (atau tidak ada) |

Tabel tersebut menunjukkan dengan jelas adanya kesenjangan pendidikan yang cukup signifikan antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan. Menanggapi tantangan ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berupaya untuk meningkatkan mutu sekaligus pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Menghadapi tahun 2025, Kemendikbudristek menyiapkan sejumlah program strategis, seperti penguatan pendidikan karakter, perluasan akses melalui kebijakan wajib belajar 13 tahun, serta peningkatan infrastruktur pendidikan (Amalia et al., 2024; Islamiyah, 2022; Maulana, 2021). Melalui kebijakan merdeka belajar dan peluncuran rapor pendidikan, kementerian menghadirkan data hasil asesmen nasional yang menyeluruh untuk membantu sekolah dan pemerintah daerah mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti. Langkah ini juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengidentifikasi berbagai tantangan nyata yang terjadi di lapangan. Selain itu, Kemendikbudristek mendorong transformasi digital pendidikan dengan meluncurkan rumah pendidikan sebagai sebuah portal layanan digital yang terintegrasi untuk mempermudah akses informasi dan memperkuat ekosistem pendidikan di era modern. Seluruh inisiatif

ini diperkuat oleh dukungan anggaran yang besar serta kolaborasi lintas sektor, demi memastikan setiap anak di Indonesia bisa memperoleh pendidikan yang adil, berkualitas, inklusif, dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan, adanya perbedaan yang mencolok dalam standar penilaian hasil belajar antara siswa di daerah perkotaan dan pedesaan mencerminkan masih adanya kesenjangan dalam akses pendidikan yang setara (Satria et al., 2025; Hendrik Dewantara, 2024; Rahma et al., 2024). Anak-anak yang tinggal di kota cenderung memiliki keuntungan karena lebih mudah menjangkau fasilitas belajar, teknologi, dan guru yang berkualitas. Sebaliknya, siswa di desa sering kali menghadapi keterbatasan sarana, minimnya pelatihan bagi guru, dan tantangan ekonomi keluarga, yang secara langsung berdampak pada prestasi belajar mereka. Berangkat dari kenyataan ini, Kemendikbudristek merespons melalui berbagai program strategis seperti merdeka belajar, rapor pendidikan, dan rumah pendidikan yang menjadi bagian dari transformasi digital pendidikan. Seluruh kebijakan ini didukung oleh anggaran besar dan kolaborasi lintas sektor agar setiap anak Indonesia, di manapun berada, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan zaman. Pemerataan pendidikan bukan sekadar wacana, melainkan tanggung jawab bersama.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menyoroti masih lebarnya jurang ketimpangan dalam sistem penilaian hasil belajar di tingkat Sekolah Menengah Pertama, khususnya antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan. Sekolah-sekolah di kota umumnya telah menerapkan sistem penilaian yang lebih tertata dan objektif, didukung pelatihan guru yang memadai serta fasilitas yang menunjang. Sebaliknya, sekolah di daerah terpencil masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sarana, minimnya pelatihan, serta praktik penilaian yang cenderung subjektif. Kondisi ini membuat capaian siswa di daerah tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Ketimpangan sosial dan ekonomi turut memperkuat masalah ini. Untuk itu, diperlukan adanya standarisasi sistem penilaian secara nasional yang tetap fleksibel terhadap konteks lokal, serta pemerataan akses pelatihan bagi para guru. Dengan begitu, setiap siswa, tanpa memandang lokasi geografisnya, memiliki peluang yang setara untuk berkembang dan mendapatkan penilaian yang adil serta bermakna.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, G., Kurniawan, I. W. D., Syadzili, M. F. R., Pd, M., Tola, B., Sos, M., Munthe, B., Milah, S., Mohzana, H., & Arizal, H. (2025). *Peran Evaluasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran*. CV Rey Media Grafika.
- Agustin, I. W., & Hariyani, S. (2023). *Pengelolaan infrastruktur kota dan wilayah*. Universitas Brawijaya Press.
- Aini, F. (2020). *Pengaruh Perkembangan E-Commerce dan Infrastruktur Telekomunikasi Terhadap Pertumbuhan*

*Ekonomi Indonesia Tahun 2001-2018*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta.

Arifin, J., & Hanif, M. (2024). Manajemen program komunitas belajar sekolah untuk peningkatan kompetensi pedagogik guru. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9(3), 1421–1432.

Aulia, H. (2022). *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Pertamina Persero Di Kota Dumai Dalam Bidang Pendidikan Non Formal Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Universitas Islam Riau.

Ayu, R., Dewi, A., & Putri, N. (2024). Analisis Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah Khusus Jakarta. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 14.

Azzahra, I. F., & Rahmadhani, R. (2025). Kurikulum Merdeka: Telaah Potensi dan Tantangan Implementatif dalam Mewujudkan Pendidikan Fleksibel di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 5(3).

Busnawir, B., Judijanto, L., Abdullah, G., Abdurahman, A., Lumbu, A., Zamsir, Z., Tumober, R. T., Septikasari, D., Sogalrey, F. A. M., & Mahliatussikah, H. (2025). *Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, & Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Duryat, D. R. H. M. (2022). *Analisis kebijakan pendidikan; Teori dan praktiknya di Indonesia*. Penerbit K-Media.

Farhas, L. F. (2021). Pelaksanaan Kebijakan Aceh Carong Dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 6(3).

Fernanda, S. A., Fernica, V. O., & Pratama, M. B. (2025). Penerapan Evaluasi Autentik Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Di Tingkat Sekolah Dasar. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 334–340.

Hasanah, R. (2025). Ketimpangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil: Isu HAM dan Kebijakan Hukum di Indonesia. *WICARANA*, 3(1), 1–9.

Hendrik Dewantara, S. E. (2024). *Membangun masa depan pendidikan: Inovasi dan tantangan dalam sertifikasi guru di Indonesia*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

Isnani, R., & Hadiansyah, F. (2025). Analisis Terhadap Implementasi Program Merdeka Belajar di Kabupaten Bandung. *BAJURI*, 1(1), 19–43.

Kurniawan, A., Mahmud, R., Rahmatika, Z., & Muhammadiyah, M. U. (2022). Dasar-dasar ilmu pendidikan. *Global Eksekutif Teknologi*.

Kusuma, J. W., Hamidah, H., Umalihayati, U., & Rini, P. P. (2024). Mengurai benang kusut kebijakan pendidikan Indonesia: Sebuah literature review analitik. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1810–1826.

Kusumawati, N. (2022). *Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar*. Cv. Ae Media Grafika.

Mawlana, A. (2023). Habitus patriarki pemilihan calon Kepala Sekolah di SMA Negeri Sumenep. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 18(1), 1–32.

Mulyanti, D. (2025). Strategi Manajemen Pendidikan di Era Digital: Optimalisasi Infrastruktur, SDM, dan Pembelajaran Berbasis Teknologi. *Jurnal Pelita Nusantara*, 2(4), 376–383.

- Mulyasa, H. E. (2021). *Menjadi guru penggerak merdeka belajar*. Bumi Aksara.
- Mutaqin, J., Nurzakiah, N., Amirudin, I., Rizky, R., Fauziah, S., & Amirudin, J. (2025). Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 1487–1496.
- Ningrum, M. A. (2022). Penerapan Sistem Zonasi Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orangtua Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(3), 932–940.
- Nissa, H. (2023). Indonesia Difusi Inovasi Pembelajaran Berbasis Teknologi Melalui Pemanfaatan Bantuan Kuota Internet KEMENDIKBUDRISTEK: Diffusion Of Innovation In Learning Based on Technology Through Utilization Of Internet Quota Subsidy. *Jurnal Teknodik*, 63–80.
- Octavia, S. (2023). *Perdagangan Orang (Human Trafficking) Pada Perempuan Migran (Studi Kasus Perempuan Purna Pekerja Migran Indonesia yang didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Wacana)*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD".
- Prastyaningrum, I., Ardi, P., & Pratama, F. Y. D. (2023). Analisis Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran untuk Anak Usia Dini. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(1), 755–760.
- Rafiq, A. (2025). *Sosialisasi Pembelajaran Mahasiswa Baru S2 dan S3 UIN Sunan Kalijaga 2025*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rahma, R., Habibburrahman, H., Mauluddin, A., & Ananda, R. (2024). Comparative Study of Basic Education in Indonesia and Finland. *Jurnal Pendidikan Ips*, 14(1), 138–147.
- Rahmi, A., & Zeky, S. (2024). *Manajemen Pendidikan*. CV. Gita Lentera.
- Ristanti, I. (2023). Digitalisasi Perencanaan Pendidikan Islam Di Madrasah. *Mapendis: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 56–107.
- Satria, D., Kusasih, I. H., & Gusmaneli, G. (2025). Analisis Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia Saat Ini: Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 3(2), 292–309..
- Setiasih, A. P., Sari, K. W., Rahmat, R. N., & Untari, S. (2024). The Role of Regional Government Towards Education in The 3T Region at Junior High School LEVEL In The Kali Pare Area, Malang District. *Jurnal Pendidikan Inovatif*, 6(3).
- Susanto, N. W., & Hermina, D. (2024). Peningkatan Daya Saing Sekolah Melalui Implementasi Platform Pendidikan Nasional Berbasis Teknologi di Indonesia. *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(2), 85–98.
- Taridala, S., & Anwar, R. (2023). *TRANSFORMASI EDUKASI: Mengoptimalkan Kinerja Guru dan Kualitas Layanan Melalui Program Merdeka Belajar*. Feniks Muda Sejahtera.
- Wang, C., Zhang, M., Sesunan, A., & Yolanda, L. (2023). Peran teknologi dalam transformasi pendidikan di Indonesia. *Kemdikbud*, 4(2), 1–7.
- Wijayati, I. W. (2025). Urgensi Memahami Ketiganya Bagi Guru dan Mahasiswa Pendidikan. *Asesmen Pembelajaran: Teori Dan Praktik*, 34.
- Wijayati, I. W., Damanik, F. H. S., & Prawirosastro, C. L. (2025). Kesenjangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil: Analisis Kebijakan dan Alternatif Solusi. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543, 6(3), 671–677.